

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1 Definisi Bangunan Gedung Negara

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011, Gedung Negara adalah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/ atau APBD.

2.1.2 Definisi Gedung Negara BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Kantor Pemerintahan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah kantor pemerintahan yang berfungsi sebagai lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

2.1.3 Kriteria Gedung Negara BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Kriteria BAPPEDA Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kriteria Bangunan Tidak Sederhana, merupakan bangunan Gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana dengan penjamin kegagalan bangunan adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Bangunan Kantor belum ada prototypenya/ di atas 2 lantai/ luasan bangunan lebih dari 500 m²
- b. Rumah dinas tipe A & B atau C,D, & E bertingkat
- c. Rumah Sakit kelas A & B
- d. Universitas/ Akademi

2.1.4 Standar Luas Gedung Kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011. Ruang Gedung kantor dengan klasifikasi bangunan tidak sederhana, adalah;

- Rata-rata 10 (Sepuluh) meter persegi perpersonel.
- Penambahan 25% luas ruang untuk sirkulasi.

Berikut **Tabel 2.1** yang merupakan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 mengenai ruang Gedung kantor dengan klasifikasi tidak sederhana:

Tabel 2.1 Standar Luas Bangunan Gedung Kantor

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2011
TANGGAL 11 OKTOBER 2011

STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR

A. RUANG UTAMA

JABATAN	R. KERJA	LUAS RUANG (m ²)								JML	KETERANGAN		
		R. PENUNJANG JABATAN				R. PELAYANAN JABATAN					JML STAF	CATATAN	
		R. TAMU	R. RAPAT	R. TUNGGU	R. ILMUHAT	R. SEKRET.	R. STAF	R. SIMPAN	R. TOILET				
1 Menteri/Ketua Lembaga	28.00	40.00	40.00	60.00	20.00	15.00	24.00	14.00	6.00	247.00	8	R.Staf pada setiap jabatan diperlukan berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m ² personel, sesuai dengan tingkat jabatan dan kebutuhan dari masing-masing K/L	
2 Wakil Menteri K/L	16.00	14.00	20.00	18.00	10.00	10.00	15.00	10.00	4.00	117.00	5		
3 Eselon IA/Anggota Dewan	16.00	14.00	20.00	18.00	10.00	10.00	15.00	10.00	4.00	117.00	5		
4 Eselon IB	16.00	14.00	20.00	9.00	5.00	7.00	4.40	5.00	3.00	83.40	2		
5 Eselon IIA	14.00	12.00	14.00	12.00	5.00	7.00	4.40	3.00	3.00	74.40	2		
6 Eselon IIB	14.00	12.00	10.00	6.00	5.00	5.00	4.40	3.00	3.00	62.40	2		
7 Eselon IIIA	12.00	6.00								24.00	0		
8 Eselon IIIB	12.00	6.00								21.00	0		
9 Eselon IV	8.00									18.80	4		

Keterangan: ...

Keterangan:

- Untuk ruang kantor Gubernur disertakan dengan ruang kantor Menteri.
- Untuk ruang kantor Walikota/Bupati disertakan dengan ruang kantor eselon IA.
- Untuk ruang kantor DPRD disertakan dengan ruang kantor eselon IIA.

B. RUANG PENUNJANG

JENIS RUANG	LUAS	KETERANGAN
1 Ruang Rapat Utama Kementerian	140 m ²	Kapasitas 100 orang
2 Ruang Rapat Utama Eselon I	90 m ²	Kapasitas 75 orang
3 Ruang Rapat Utama Eselon II	40 m ²	Kapasitas 30 orang
4 Ruang Studio	4 m ² /orang	Pemakai 10% dari staf
5 Ruang Arsip	0,4 m ² /orang	Pemakai seluruh staf
6 WC/Toilet	2 m ² /25 orang	Pemakai Pejabat Eselon V sd Eselon III dan seluruh staf
7 Musholla	0,8 m ² /orang	Pemakai 20% dari jumlah personel

Keterangan:

- Untuk ruang penunjang Gubernur disertakan dengan ruang penunjang Menteri.
- Untuk ruang penunjang Walikota/Bupati disertakan dengan ruang penunjang Eselon I.
- Untuk ruang penunjang DPRD disertakan dengan ruang penunjang Eselon II.

C. SIRKULASI

25% X (JUMLAH A + B)

Keterangan:

- Standar luas ruang tersebut di atas merupakan acuan dasar yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.
- Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.
- Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, dan di luar standar luas tersebut di atas.

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011

Berdasarkan **Tabel 2.1** di atas, Kantor Pemerintah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat masuk kedalam klasifikasi bangunan tidak sederhana Eselon 2A.

2.1.5 Jumlah Lantai

Menurut Peraturan Presiden Nmor 73 Tahun 2011 pasal 10, Jumlah lantai untuk bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai. Apabila bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai, bangunan gedung negara tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

2.1.6 Tipologi Perkantoran

Menurut Markus Zain (1999 : 127) tipologi adalah klasifikasi watak atau karakteristik dari formasi objek – objek bentukan fisik kota dalam skala lebih kecil. RobKrier (1991 : 15-62) mengemukakan secara teoritis berbagai tipologi ruang terbuka dan tertutup berdasarkan geometri dasar segi empat, lingkaran dan segitiga dengan berbagai variasinya.

Dalam aspek perencanaan harus mempertimbangkan konsentrasi pekerjaan yang sangat besar karena satu bangunan kantor dapat menimbulkan dampak pada suatu lingkungan.

Dalam proses pembentukan tipologi perkantoran terbagi kedalam 4 masa, yaitu:

a. Kantor pada Jaman Revolusi Industri

Di Eropa (abad 18-19) peningkatan pesat kegiatan perbankan, asuransi, telekomunikasi/telegraf, transportasi menyebabkan banyak peningkatan kebutuhan sarana perkantoran sebagai akibat banyaknya kebutuhan pekerja kantor. Berikut **Gambar 2.1** yang merupakan gambaran kantor pada jaman revolusi industri.



Gambar 2.1 Masa Perkantoran pada Revolusi Industri

sumber: www.scribd.com/doc/301533798/Tipologi-Sarana-Perkantoran

b. Abad ke-19

Pada abad ke-19, Kantor dibangun bertingkat karena harga tanah di tengah kota semakin mahal. Bangunan kantor semakin tinggi dengan inovasi elevator yang aman (1852) dan teknologi biasa. Berikut **Gambar 2.2** yang merupakan gambaran masa perkantoran pada Abad ke-19.



Gambar 2.2 Masa Perkantoran pada Abad ke - 19

sumber: www.scribd.com/doc/301533798/Tipologi-Sarana-Perkantoran

c. Pasca Perang Dunia II

Ruang-ruang kantor mulai menyajikan ruangan yang membuat nyaman pekerja, managemen berubah dan pekerjaan disusun berdasarkan kluster kelompok individu. Berikut **Gambar 2.3** yang merupakan gambaran masa perkantoran pasca Perang Dunia II.

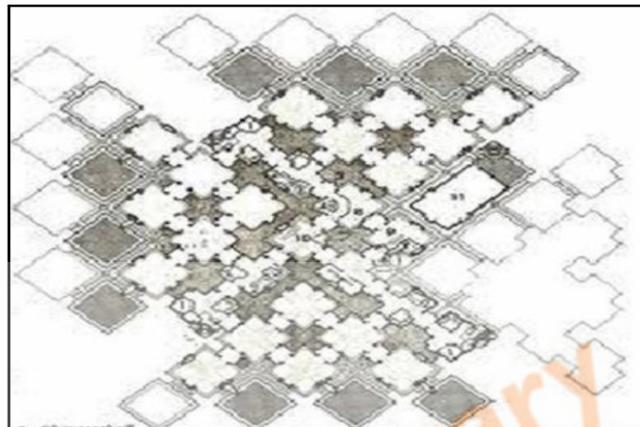


Gambar 2.3 Masa Perkantoran Pasca Perang Dunia II

sumber: www.scribd.com/doc/301533798/Tipologi-Sarana-Perkantoran

d. Tipologi Bangunan tahun 1970-sekarang

Menciptakan bangunan yang memaksimalkan dinding luar (perimeter) untuk kantor *cellular*. Kecenderungan bangunan semakin tipis dengan jara *core* konsisten. Berikut **Gambar 2.4** yang merupakan gambaran masa perkantoran pada tahun 1970-sekarang.



Gambar 2.4 Masa Perkantoran pada tahun 1970 -sekarang

sumber: www.scribd.com/doc/301533798/Tipologi-Sarana-Perkantoran

2.2 Tinjauan Khusus

2.2.1 Definisi Judul

a. Rancangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Rancangan berasal dari kata rancang yang memiliki arti proses, cara, perbuatan merancang.

b. Kantor Pemerintahan

Adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja satuan organisasi kementerian/ departemen, Lembaga Pemertintah Non Departemen, kesekretariatan Lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

b. BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Dalam perannya kantor pemerintahan berperan sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan rumusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan daerah tersebut meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan dan perencanaan Daerah Kabupaten/ Kota, serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan.

c. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan berasal dari kata terap yang memiliki arti proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan, pemasangan; perihal mempraktikan.

d. Prinsip

Definisi prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asas benar yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb; dasar.

f. Arsitektur

Arsitektur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya.

g. Fungsional

Menurut para ahli adalah suatu hal yang dirancang untuk mampu melakukan suatu atau lebih kegiatan yang praktikal, lebih

mengutamakan fungsi dan kebergunaan ketimbang hal – hal yang berbau dekorasiatraktif (tidak ada fitur yang tidak perlu)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa “Rancangan Kantor Pemerintahan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Melalui Penerapan Prinsip Arsitektur Fungsional” merupakan sebuah kantor pemerintahan yang akan dirancang dengan pendekatan pokok dasar desain arsitektur yang mengutamakan pada fungsi kantor pemerintahan. Prinsip – prinsip yang digunakan dalam merancang kantor pemerintahan ini adalah prinsip dasar dari arsitektur modern yang memiliki turunan yaitu arsitektur fungsionalisme dimana pada prinsipnya, rancangan akan mengutamakan fungsi bangunan, atau biasa disebut, *form follow function* yaitu bentuk mengikuti fungsi.

2.2.2 Definisi Arsitektur Fungsionalisme

a. Sejarah Arsitektur Fungsional

Arsitektur adalah suatu bentuk hasil seni yang diterapkan ke dalam bentuk bangunan. Dimana dalam arsitektur ini terdapat berbagai aliran arsitektur. Diantara itu semua ada satu aliran yang memiliki pengaruh dalam perkembangan arsitektur dunia, yaitu Aliran Arsitektur Modern.

Aliran Arsitektur Modern sendiri terbagi beberapa fase yang salah satunya adalah aliran Arsitektur Modern Fungsionalisme. Perkembangan Arsitektur Modern Fungsionalisme diwarnai dengan anti pada pengulangan bentuk-bentuk lama dengan teknologi baru (beton bertulang, baja). Dan pada awal abad 20 terjadi perubahan besar, radikal, cepat, dan revolusioner dalam pola pikir. (Sumalyo,1997).

Pada era pra modern, yang dianggap sebagai arsitektur hanyalah bangunan- bangunan gereja dan istana. Bangunan di luar kedua tipe bangunan tersebut (seperti perumahan) tidak dianggap sebagai suatu arsitektur. Pada era modern timbul aktivitas- aktivitas baru yang membutuhkan wadah akibat dampak dari revolusi industri. Mulai bermunculan bangunan-bangunan pabrik, perkantoran, dan sebagainya.

Sebagai akibat Revolusi Industri, cara produksi bergeser dari teknik individual yang cenderung custom made, menjadi teknik produksi massal yang mengedepankan kebutuhan akan produk yang cepat dan murah. Pada sudut pandang arsitektur, hal ini ditandai dengan adanya kebutuhan akan pemukiman yang murah dan efisien.

Arsitektur modern mengedepankan fungsi dimana suatu arsitektur dapat mewadahi aktivitas. Berbeda dengan arsitek pada masa pra modern yang menata berdasarkan tipologi, arsitek modern menata berdasarkan fungsi.

Dalam pandangan arsitektur modern (1910-1940-an), terjadi perubahan dalam pola dan konsep keindahan arsitektur, di mana keindahan timbul. Dalam pandangan arsitektur modern (1910-1940-an), terjadi perubahan dalam pola dan konsep keindahan arsitektur, di mana keindahan timbul semata-mata oleh adanya fungsi dari elemen-elemen bangunan. Oleh karena itu aliran ini disebut sebagai Arsitektur Fungsionalisme atau Rasionalisme (berdasarkan rasio/pemikiran yang logis). Bangunan terbentuk oleh bagian-bagiannya apakah dinding, jendela, pintu, atap, dll tersusun dalam komposisi dari unsur unsur yang semuanya mempunyai fungsi. (Sumalyo, 1997) Aliran ini sendiri muncul sebagai salah satu ide pembaharuan dari ekspresi bentuk arsitektural yang pernah ada (misal: aliran arsitektur klasik).

b. Karakteristik dan Ciri-ciri Arsitektur Fungsionalisme

Fungsionalisme merupakan salah satu alternatif dari Arsitektur Modern, sehingga ciri-ciri fungsionalisme tidak jauh berbeda dengan ciri Arsitektur Modern pada umumnya. Menurut Rayner Banham dalam bukunya “Age of The Master : A Personal View of Modern Architecture”, 1978, perkembangan arsitektur modern menekankan pada kesederhanaan desain. Para arsitek pada masa itu menginginkan bangunan rancangannya bersih dari ornamen dan sesuai dengan fungsinya dengan menghilangkan paham eclecticism pada tiap

rancangannya. Arsitektur modern merupakan Internasional Style yang menganut Form Follows Function (bentuk mengikuti fungsi).

Berikut ciri-ciri dari Arsitektur Fungsionalisme:

- a. Mengikuti fungsi (form follow function).
- b. Mengutamakan penyederhanaan dari gaya sebelumnya (klasik).
- c. Ditujukan kepada fungsi utama bangunan.
- d. Bentuk bangunan geometris dan jelas.
- e. Minim/anti ornament.
- f. Batas-batas antar ruang jelas dan saling terhubung.
- g. Terbentuk dari garis-garis vertikal, horizontal, dan diagonal yang sederhana.
- h. Dinding eksterior luas.

Berdasarkan 2 (dua) hal tersebut dapat disimpulkan bahwa arsitektur fungsional adalah arsitektur yang mengutamakan fungsi dalam segi perancangannya.

2.3 Studi Banding

2.3.1 Finlandia Hall

Arsitek : Alvar Aalto

Lokasi : Finladian Park

Area : 20.524 m²

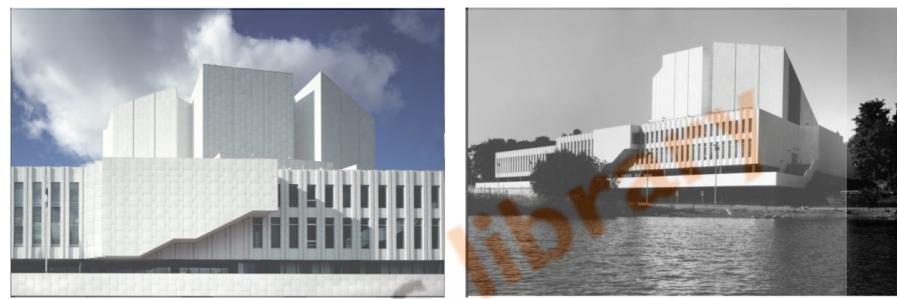
Tahun Proyek : 1971

Finlandia Hall adalah tempat kongres dan acara di pusat Helsinki di Teluk Töölönlahti. Bangunan, yang dirancang oleh arsitek Alvar Aalto, selesai pada tahun 1971.

Fitur utama bangunan Finlandia Hall adalah bagian seperti menara dengan atap yang miring. Ide Alvar Aalto di balik desain adalah bahwa ruang kosong yang tinggi akan memberikan akustik yang lebih baik. Langit-langit kisi menyembunyikan ruang untuk audiens tetapi memungkinkan penciptaan pasca-gema yang sama

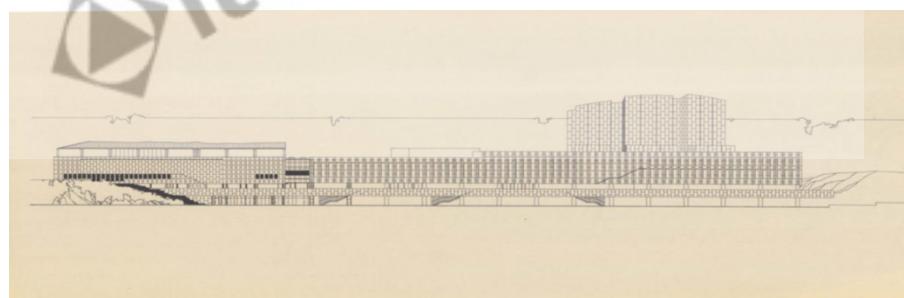
dalam dengan menara gereja yang tinggi. Aalto menggunakan marmer di permukaan dalam dan luar ruangan sebagai kontras dengan granit hitam. Bagi Aalto, marmer adalah ikatan dengan budaya Mediterania, yang ingin ia bawa ke Finlandia.

Bangunan utama menampung Auditorium Utama (kursi 1700), Helsinki Hall (kursi 340), Terrace Hall (kursi 250), Hall Elissa (kursi 130), Aurora Hall (kursi 894), Veranda (kursi 1700) dan Restoran Finlandia, seperti juga Cafe Veranda (terbuka untuk umum) dan Galleria Veranda. Berikut **Gambar 2.5, 2.6, dan 2.7** yang merupakan gambaran bentuk Finlandia Hall berupa denah, tampak, dan potongan.



Gambar 2.5 Bagian Luar Finlandia Hall

sumber: www.archdaily.com

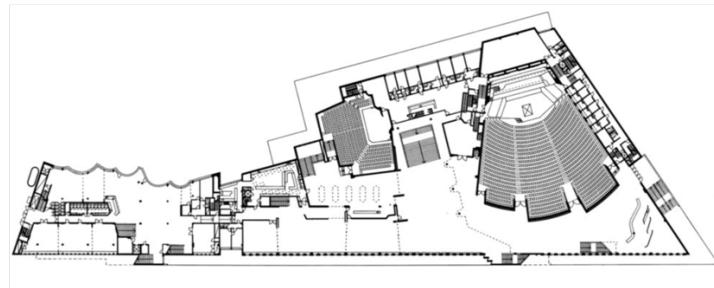


Gambar 2.6 Tampak Depan Finlandia Hall

sumber: www.archdaily.com

Keterangan:

1. Tampak depan
2. Tampak samping
3. Tampak keseluruhan
4. Denah
5. Potongan

**Gambar 2.7 Denah Finlandia Hall**sumber: www.archdaily.com

2.3.2 Kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo

Tahun : 2010

Luas : 2.200 m²

Tipe Bangunan : Gedung Pemerintahan

Kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo merupakan badan perencanaan pembangunan yang terletak di Provinsi Gorontalo. Gedung ini mulai dibangun melalui 3 tahap yang dimulai pada tahun 2010 dan memiliki ketinggian 3 lantai.

Lokasi Kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo berada di Jalan lingkar Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kotamadya Gorontalo. Kantor ini dibangun pada lahan seluas 3000 m² dengan luas bangunan 2200m².

Sekilas gaya bangunan kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo mengadopsi gaya arsitektur Romawi Klasik. Gaya tersebut terlihat melalui tampilan pilar – pilar kolom yang besar dan menjulang dengan memberikan kesan gagah dan kokoh. Namun, sebenarnya kantorini mengadopsi desain dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang berada di Jakarta Pusat.

Pilar – pilar yang berjumlah 5 (lima) buah tersebut diambil dari istilah bahasa lokal setempat yaitu, “*Duluwo Limo Lo Pohala*” yang berarti semangat persatuan didalam perbedaan demi mencapai kebaikan bersama. Selain itu, kelima pilar mengandung makna Pancasila, yang telah menjadi ideologi kebangsaan Indonesia dalam bingkai negara kesatuan republik.

Kantor BAPPEDA Provinsi Gorontalo merupakan salah satu gedung pemerintahan yang menerapkan nilai – nilai kebangsaan dan kearifan lokal secara tidak langsung dengan cara mengimplementasikan nilai moral dan memadukan dengan gaya bangunan yang modern. Berikut **Gambar 2.8** dan **Gambar 2.9** yang merupakan gambaran berupa foto BAPPEDA Provinsi Gorontalo.



Gambar 2.8 Tampak Depan Gedung BAPPEDA Provinsi Gorontalo

Sumber: budisusilo85.blogspot.com



Gambar 2.9 Tampak Belakang Gedung BAPPEDA Provinsi Gorontalo

Sumber: budisusilo85.blogspot.com

2.3.3 Villa La Roche

Aristek	: Le Corbusier
Lokasi	: Paris, France – Maison Villa La Roche
Tahun Proyek	: 1923

Dirancang 1925-1925 sebagai tempat tinggal bagi bankir Swiss Raoul La Roche, Villa Roche adalah inti dari pendekatan modern Le Corbusier terhadap perumahan. Villa ini bertindak sebagai ruang pameran untuk koleksi karya seni avant-garde Mr. Roche, dan merupakan kumpulan murni volume ruang yang mengaitkan dua program domisili dan galeri. Berjalan kaki melalui Villa Roche memainkan peran penting dalam menghubungkan dua program ini menjadi satu. Itu dibayangkan sebagai "pengalaman spasial" dan terdiri dari jalur yang disengaja khusus yang memandu penduduk dan mengungkap karya seni sebagai rencana perjalanan melalui sejarah.

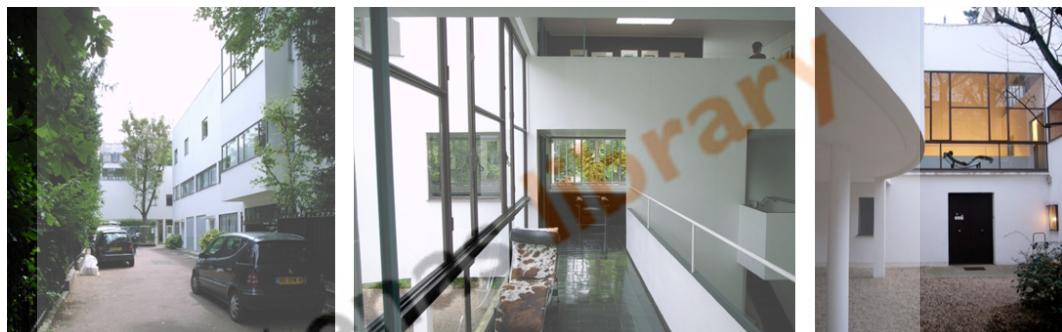
Dimulai dengan seni Cubist dan diakhiri dengan Purism, promenade mengarah melalui piano yang mulia ke dalam suksesi ruang yang sangat terang yang dirancang untuk menjadi pengalaman dan dilihat dari satu titik tetap. Bukaan dinding, tangga, landai, dan balkon yang ditempatkan dengan tepat membagi ruang menjadi lapisan seperti tiga dimensi yang permeable terhadap pencahayaan yang memukau, namun halus dan tidak mengganggu keseimbangan Villa.

Villa Roche pastinya adalah kompleks bentuk dan program; hierarki adalah tema yang terinspirasi oleh kunjungan Corbusier ke Acropolis. Setiap kamar memiliki tujuan khusus - kamar tidur, dapur, kamar mandi - disusun secara offside ke area yang jauh lebih besar yang bertindak sebagai ruang depan pusat, menyebarkan cahaya ke seluruh Villa dan pedalaman.

Melalui serangkaian kontrak dan koridor yang diperluas di Villa Roche, penghuni diizinkan merasakan pengalaman ruang yang dipersonalisasi. Volume spasial yang menonjol berfungsi sebagai titik fokus di mana kawasan pejalan kaki dapat mengalami sekaligus, namun, itu adalah jalur individu di seluruh villa inilah yang akan menentukan persepsinya tentang tempat tinggal ini.

Sesuai dengan "ruang warna Corbusien," interior Villa Roche menggunakan skema warna polikromatik, mulai dari abu-abu gelap, hingga biru pucat, hingga sienna pucat. Berbeda dengan fasad yang seluruhnya putih, langit-langit warna yang cerah menyelaraskan yang lain. penataan asimetris dari Villa.

Pendekatan istimewa Le Corbusier untuk desain Villa Roche menghasilkan model arsitektur Prancis yang menakjubkan, dan merupakan representasi dari pendekatan desain sistematisnya sepenuhnya. Le Corbusier menggambarkan Villa Roche sebagai "indah, penuh gerakan, tetapi membutuhkan hierarki klasik untuk mendisiplinkannya." Berikut **Gambar 2.10, 2.11, dan 2.12** yang merupakan gambaran dari Villa La Roche.



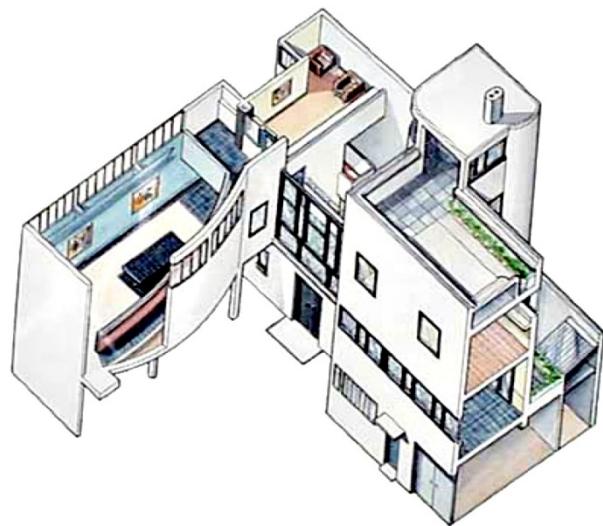
Gambar 2.10 Bagian Dalam Villa La Roche

sumber: www.archdaily.com



Gambar 2.11 Ruangan – ruangan Villa La Roche

sumber: www.archdaily.com



Gambar 2.12 Isometri Bangunan Vila La Roche

sumber: www.archdaily.com